

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( L A K I P )**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jl. Letnan Amir Kusman No. 2 Bondowoso Telp. 0332-423934  
Pebruari, 2016**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Hidayah-Nya semata, akhirnya Laporan Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Bondowoso Tahun 2015, dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan bagian dari tugas Penyelenggara Pemerintahan Negara dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang dipercayakan berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis, yang merupakan bagian dari implementasi dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayaaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Akhirnya, dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Bappeda Bondowoso untuk selalu meningkatkan kualitas kerjanya dalam tahun-tahun berikutnya.

Bondowoso, Pebruari 2016

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) merupakan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan hasil kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 . Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar sebagai alat akuntabilitas tetapi juga sebagai sarana bagi evaluasi diri dalam rangka meningkatkan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja tahun 2015. Dimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berisikan tentang Program dan Kegiatan serta Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2015 sedangkan Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran serta target kinerja tahun 2015 yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, maka dapat digambarkan capaian yang dihasilkan yaitu :

a. Akuntabilitas Anggaran

- Anggaran Rp. 11.786.990.250,-
- Realisasi Rp. 10.715.690.948,- ( 90,91 % )
- Sisa Rp. 1.071.299.302,-

b. Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan mencapai 98,33 %

Realisasi Fisik Kegiatan mencapai 98,33 karena Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan terealisasi 40 % yaitu penyusunan 1 (satu) dokumen PDRB Kabupaten, sedangkan 1 (satu) dokumen PDRB Kecamatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya perubahan dalam pola penghitungan PDRB di tingkat Kecamatan oleh BPS

c. Capaian Indikator Kinerja

Secara umum Target Indikator Kinerja Program dan Sasaran dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, tetapi ada Indikator yang tidak mencapai target antara lain :

1. Indikator Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2015 hanya mencapai 80,52 % atau dari Target 190 Program Terealisasi 153 Program atau 80,52 %, dikarenakan jumlah program yang dianggarkan pada tahun 2015

disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2015 dan kemampuan anggaran.

2. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD dari target 7 (tujuh) dokumen yang disusun tahun 2015, terealisasi sebanyak 6 (enam) dokumen sedangkan dokumen yang belum terealisasi adalah dokumen penyelarasan RPJMD 2014-2018 dengan RPJMN 2015-2019 karena masih menunggu pertemuan dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.

d. Permasalahan dan Solusi

Internal :

1. Meningingkat permasalahan dan pelaksanaan pembangunan semakin berkembang serta teknologi informasi yang berkembang pula, maka diperlukan Pendidikan dan Pelatihan - Pelatihan atau Bimbingan Teknis, baik itu dalam Perencanaan Pembangunan maupun bidang teknis lainnya untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Kurangnya jumlah pegawai utamanya unsur staf, tidak mengimbangi beban tugas pokok dan fungsi perencanaan maupun tugas pengelolaan administrasi keuangan kegiatan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan keuangan kegiatan tidak sesuai rencana penyerapan anggaran bulanan atau triwulanan. sehingga memerlukan adanya penambahan staf/pegawai.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang menjadi hal yang harus terpenuhi untuk kelancaran pelaksanaan tugas walaupun dari sisi jumlah telah mencukupi akan tetapi beberapa sarana yang ada mengalami gangguan yang diakibatkan dari usia dan volume penggunaan yang sangat besar. Pengadaan atau pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor menjadi hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti : pengadaan dan pemeliharaan komputer, printer, LCD, kendaraan dinas, meubelair, ruang kerja dan rehabilitasi/ pemeliharaan gedung.

Eksternal

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya sistem/mekanisme perencanaan pembangunan daerah khususnya pada pemahaman indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran sehingga diperlukan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi yang terus menerus kepada seluruh untuk meningkatkan pemahaman Aparatur.
2. Masih kurangnya konsistensi dalam penyusunan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan sehingga

diperlukan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi tentang penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik pada tingkat pemerintahan desa (RPJMDesa/RKPDDes, APBDDesa) maupun di tingkat Kabupaten (Renstra SKPD, Renja SKPD,RKA SKPD, DPA SKPD)

3. Perlunya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Dokumen RPJMD,RKPD,Masterplan, Rencana Aksi Daerah) kepada SKPD dalam rangka penyelarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan SKPD.

#### Urusan Tata Ruang

1. Belum tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang yang memadai. Pengaturan Rencana Tata Ruang hanya didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bondowoso. Masih terdapat beberapa kawasan strategis dan prioritas perkembangannya sangat dinamis belum disusun rencana detail tata ruangnya (RDTR).
2. Kebijakan penataan ruang yang ada belum optimal mengakomodir perkembangan sosial ekonomi masyarakat diantaranya meningkatnya pengembangan perumahan baru dikawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah irigasi menjadi tanaman kehutanan dan ruang terbangun (perumahan, pergudangan dan usaha) maraknya pertambangan pasir, batuan tanpa ijin dan tumbuhnya pemanfaatan ruang di sempadan jalan (rumija dan ruwasja) serta sempadan sungai.
3. Belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dikawasan perkotaan sesuai ketentuan minimal yaitu 20 % dari luas kawasan perkotaan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi arahan Rencana Tata Ruang dan mengikuti mekanisme perijinan pemanfaatan ruang dengan benar.
5. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah.

#### Urusan Penanaman Modal

1. Masih belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bondowoso sehingga perlu diprioritaskan program peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengembangan agribisnis pada sektor pertanian/kehutanan dan pariwisata.
2. Tindak lanjut hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan perlu ditingkatkan agar Kajian yang dilakukan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
3. Kelembagaan penanaman modal masih belum ada meskipun pelayanan perijinan terpadu sudah berdiri dan sudah menerbitkan 72 Jenis Perijinan dan pelaksanaan urusan penanaman modal masih menempel pada SKPD lain sehingga pelaksanaannya belum maksimal dengan mengupayakan berdirinya lembaga penanaman modal yang mandiri agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan maksimal

4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan penanaman modal dan pengembangan peluang investasi di tiap sektor terus dilakukan sebagai dasar penetapan arah kebijakan dan target pembangunan penanaman modal.
5. Promosi peluang investasi dan potensi daerah perlu ditingkatkan melalui berbagai media dan keikutsertaan dalam pameran investasi baik ditingkat regional maupun nasional.

#### Urusan Statistik

1. Penyelenggaraan dan pengolahan data/informasi/statistik sebagaimana Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) meskipun urusan penyelenggaraan pemerintahannya menjadi urusan Pemerintah Daerah sehingga data - data publis yang terkait dengan indikator makro daerah menjadi tanggungjawab BPS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Transparansi atau keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan keinginan masyarakat saat ini. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dan tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah hal yang wajar. Pemerintah daerah merespon positif terhadap keinginan masyarakat dengan melaksanakan perubahan arah menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tuntutan terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perlu disusun langkah – langkah strategis. Langkah – langkah strategis yang dimaksud adalah rencana-rencana tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal daerah serta memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah ini memiliki maksud dan tujuan adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangkukepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis /target kinerja yang telah ditetapkan.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 239 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP;
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### D. GAMBARAN ORGANISASI

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso didasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya mengatur kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk merumuskan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Bappeda merupakan institusi pemerintah yang membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan. Bappeda mempunyai tugas yang sangat kompleks antara lain :

1. Melaksanakan tugas pokok perencanaan yaitu menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan pembangunan.
2. Melaksanakan tugas pengendalian yaitu melakukan pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan.
3. Melaksanakan tugas koordinasi yaitu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintah daerah serta instansi vertikal dan badan lain yang berada di pemerintah propinsi maupun pusat.

#### KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah



membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah.
4. Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah Bidang Ekonomi, sosial dan budaya serta prasarana wilayah
5. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan
6. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
7. Penyusunan dan pengkoordinasian Program Kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pembangunan dan investasi daerah.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso menangani kewenangan 4 (empat) urusan wajib yaitu :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Urusan Tata Ruang
3. Urusan Penanaman Modal
4. Urusan Statistik

## LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi lingkungan internal dan eksternal yaitu

### 1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Bappeda terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

#### 1.1 Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya sistem perencanaan pembangunan yang memiliki mekanisme yang baik.
- 2) Banyaknya kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan
- 3) Adanya dokumen perencanaan yang dihasilkan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
- 4) Adanya dukungan data dan informasi
- 5) Adanya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal
- 6) Adanya struktur kelembagaan yang cukup baik
- 7) Meningkatnya disiplin dan komitmen melaksanakan tugas bagi Pegawai

#### 1.2 Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya wadah peningkatan kemampuan teknis perencanaan pembangunan bagi Pegawai (Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan )
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas
- 3) Masih kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi yang terus berkembang
- 4) Masih kurangnya jumlah pegawai

## 2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena *berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Bappeda Kabupaten Bondowoso namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi*. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

### 2.1 Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya dukungan alokasi anggaran
- 2) Banyaknya lembaga dan dinas teknis terkait
- 3) Jumlah usulan program pembangunan yang masuk cukup banyak
- 4) Adanya komitmen baik dari Pemerintah dan Masyarakat akan perlunya akuntabilitas publik
- 5) Adanya wadah organisasi yang terencana (Musrenbang, Sinkronisasi, Rakornas)

### 2.1. Faktor Ancaman/Tantangan Organisasi :

- 1) Masih kurangnya penyatuan persepsi terhadap program pembangunan (sektoralistik)
- 2) Kurangnya peningkatan frekuensi koordinasi

- 3) Belum optimalnya (kualitas dan kuantitas) usulan program / kegiatan secara bottom up
- 4) Belum maksimalnya pemanfaatan secara substansi dokumen perencanaan pembangunan
- 5) Belum maksimalnya pelaksanaan penataruangan wilayah
- 6) Belum Optimalnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal
- 7) Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dinas terkait

#### E. REFORMASI BIROKRASI

Untuk mendukung komitmen reformasi birokrasi, beberapa hal yang terus menerus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik antara lain :

1. mempercepat pelayanan rekomendasi atas kebutuhan masyarakat miskin pada sektor kesehatan di Kabupaten Bondowoso yang memerlukan Surat Keterangan Miskin (SKM),
2. mempercepat pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha,
3. menyediakan dan mengembangkan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi masyarakat melalui website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso serta
4. memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan informasi data pembangunan di Kabupaten Bondowoso yang digunakan untuk penelitian, kajian maupun untuk publikasi.

#### F. INOVASI SKPD

Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, beberapa hal yang sudah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, antara lain :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini di Kabupaten Bondowoso melalui Kunjungan Kerja Bupati Bondowoso ke seluruh Kecamatan se Kabupaten Bondowoso;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIDa)
3. Tersedianya Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal)
4. Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bondowoso melalui Website Bappeda

## G. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Ekonomi
4. Bidang Sosial dan Budaya
5. Bidang Prasarana Wilayah
6. Bidang Data dan Penelitian
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1. Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten mempunyai tugas memimpin dalam perumusan perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan program dan melakukan hubungan atau kerjasama dengan instansi lain dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

### 2. Sekretariat,

Dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan gaji pegawai.
- c. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- d. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 3. Bidang Ekonomi,

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Sub Bidang Industri, Dunia Usaha dan Penanaman Modal. Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dalam urusan koperasi usaha kecil dan menengah,

penanaman modal, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perikanan, perdagangan dan perindustrian. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan di bidang ekonomi meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perikanan, perdagangan dan perindustrian.
- b. Pengkoordinasian rencana pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perikanan, perdagangan dan perindustrian.
- c. Penyusunan program-program pembangunan bidang ekonomi lintas sektoral dan lintas kecamatan.
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi dan perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- e. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penanaman modal.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

4. Bidang Sosial dan Budaya,

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, mental spiritual, pemerintahan dan aparatur, kesejahteraan rakyat, kependudukan, ketenagakerjaan serta kesehatan masyarakat. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian serta kearsipan.
- b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana-rencana pembangunan di dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian serta kearsipan oleh dinas-dinas dan satuan organisasi lain yang diusulkan kepada

- pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program kegiatan pemerintah propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program nasional.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang sosial dan budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan.
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
5. Bidang Prasarana Wilayah,  
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan pembangunan dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, perhubungan, dan lingkungan hidup.
  - b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana-rencana pembangunan di dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program kegiatan pemerintah propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program nasional.
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan.
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
6. Bidang Data dan Penelitian,  
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pengendalian dan Statistik dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Data dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pelaporan data/statistik daerah, melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam urusan penelitian dan pengembangan dengan fungsi :
- a. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan.
  - b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan.

- c. Pengolahan data dan statistik.
- d. Penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan.
- e. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka menyusun perencanaan penelitian
- f. Pelaksanaan Penelitian dan atau kerjasama dengan instansi lain.
- g. Penyusunan laporan dan sosialisasi hasil penelitian
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar bidang dan instansi lain dalam kegiatan penelitian
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Tata Kerja

- a. Semua unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- b. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib melaksanakan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- d. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- e. Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- g. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 terlampir.

## H. KONDISI SUMBER DAYA

### **Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Staf**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II/b	1 Orang
2	Eselon III/a	1 Orang
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	11 Orang
5	Staf PNS/CPNS	26 Orang
6	Tenaga Kontrak	2 Orang
	Jumlah	43 Orang

### **Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	7 Orang
2	Sarjana (S1)	27 Orang
3	Diploma	1 Orang
4	SLTA/SLTP/SD	8 Orang
	Jumlah	43 Orang

### **Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	29 Orang
3	Golongan II	7 Orang
4	Golongan I	1 Orang
5	Tenaga Kontrak	2 Orang
	Jumlah	43 Orang



### Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	2 Unit	Baik
2	Motor	32 Unit	Baik/Kurang Baik
3	Meja Kerja	65 Unit	Baik
4	Kursi Kerja	59 Unit	Baik
5	Sofa	1 Set	Baik
6	Lemari Arsip	30 Unit	Baik/Kurang Baik
7	Kursi Rapat	60 Unit	Baik
8	Komputer PC	38 Unit	Baik/Kurang Baik
9	Laptop	15 Unit	Baik/Kurang Baik
10	Printer	24 Unit	Baik/Kurang Baik
11	Camera Digital	10 Unit	Baik/Kurang Baik
12	LCD Proyektor	6 Unit	Baik/Kurang Baik
13	Layar LCD Proyektor	5 Unit	Baik/Kurang Baik
14	AC	18 Unit	Baik/Kurang Baik
15	Exhouse Fan	5 Unit	Baik
16	Mikropone Table Stand	13 Unit	Baik
17	Kursi Lipat	20 Unit	Kurang Baik
18	Filling Kabinet	15 Unit	Baik/Kurang Baik
19	Brankas	4 Unit	Baik
20	Papan Visual	2 Unit	Baik
21	Handy Talky	4 Unit	Baik
22	GPS	3 Unit	Baik/Kurang Baik
23	Meja Komputer	3 Unit	Baik
24	Sound System	1 Set	Baik
25	Equaliser	1 Set	Baik
26	Handycamp	1 Unit	Baik
27	UPS	8 Unit	Baik
28	Faksimile	2 Unit	Baik
29	Server Jaringan Komputer	1 Set	Baik

#### I. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS SKPD

##### 1. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah

- 1.1. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.2. Urusan Tata Ruang
- 1.3. Urusan Penanaman Modal
- 1.4. Urusan Statistik

##### 2. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan *visi* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah :  
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah dan Terpadu Secara Berkelanjutan”

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah

Perencanaan pembangunan daerah yang terarah memiliki makna bahwa :

1. Perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menyelaraskan dengan kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional sehingga pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar dapat memberikan arah bagi proses pelaksanaan pembangunan di daerah sekaligus sebagai fungsi kontrol dan pengendali pelaksanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar komponen – komponen daerah sebagai penunjang pembangunan dapat dikembangkan secara optimal yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah disegala bidang.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu

Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu memiliki makna :

1. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan pendekatan top down dan bottom up system yaitu perencanaan pembangunan disusun dengan mengakomodir usulan dari bawah yaitu para stakeholder dan masyarakat melalui suatu mekanisme tertentu sedangkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya semaksimal mungkin menuangkannya ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar semua sektor pembangunan yang akan dilaksanakan tidak saling tumpang tindih melainkan semua sektor pembangunan dapat saling melengkapi dan mendukung dalam satu kesatuan sistem pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan memiliki makna :

Perencanaan pembangunan yang merupakan kesatuan rangkaian dengan tahapan perencanaan pembangunan sebelumnya dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut ditetapkan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun *misi* yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas
2. Melanjutkan terwujudnya Sistim Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat
3. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah:
4. Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal
5. Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu daerah yang dihadapi dengan rumusan sebagai berikut :

- a. merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan misi SKPD yang ingin dicapai.
- b. tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif namun setidaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa akan datang.
- c. harus realistis dan dapat dicapai.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan selamam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :

- a. Spesifik yaitu sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas
- b. Dapat diukur yaitu sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur
- c. Dapat dicapai yaitu sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada
- d. Relevan yaitu sasaran mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
- e. Mempunyai batas waktu yaitu pencapaian sasaran ditetapkan
- f. Perbaikan berkelanjutan yaitu Sasaran dapat dicapai secara bertahap

Untuk mencapai misi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis maka sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan sebagaimana **Tabel 2**.

**Tabel 2**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD**

N O	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	<b>MISI 1 :</b> Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1.1. Meningkatnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu  1.2 Meningkatnya Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2	<b>MISI 2 :</b> Melanjutkan terwujudnya Sistem Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat.	1. Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan .	1.1. Meningkatnya Penyusunan Data Informasi 1.2 Meningkatnya dokumen data dan informasi yang dimanfaatkan SKPD
3	<b>MISI 3 :</b> Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	1.1 Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas 1.2 Meningkatnya pemetaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya 1.3 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4	<b>MISI 4 :</b> Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal	1. Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	1.1. Meningkatnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal  1.2. Meningkatnya Investasi di Daerah

<b>N O</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	2	3	4
5	<b>MISI 5 :</b> Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur Dalam Perencanaan.	1.1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran 1.2 Meningkatnya sarana dan Prasarana kantor 1.3. Meningkatnya Kemampuan Aparatur

#### **4. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi pelayanan dengan prinsip-prinsip :

- a. Menterjemahkan strategi kedalam bentuk operasional
- b. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategis jangka menengah
- c. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi
- d. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan
- e. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, dimana kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, fokus, kongrit dan operasional
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dapat digambarkan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bondowoso sebagaimana **Tabel 3**

Tabel 3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
1.	<b>MISI 1 :</b> Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1.1. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu  1.2 Terlaksananya Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dengan Optimal.	1.1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berjenjang dan Teritegrasi sesuai dengan Kemampuan Daerah dan Kebutuhan Masyarakat  1.2.1 Meningkatkan Koordinasi dan Pelaksanaan Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.1.1.1. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Telah Ditetapkan Dengan Optimal. 1.1.1.2 Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Efektif 1.1.1.3 Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur 1.1.1.4 Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Yang Sesuai dengan Perkembangan Perencanaan Pembangunan Daerah  1.2.1.1 Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Berkala. 1.2.2.1 Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas
2	<b>MISI 2 :</b> Melanjutkan terwujudnya Sistim Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat	1.1 Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan .	1.1.1 Terlaksananya Penyusunan Data Informasi Yang Akurat.	1.1.1. Meningkatkan Koordinasi Dalam Perumusn Dan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan	1.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi / Statistik Daerah Yang Berkualitas
3	<b>MISI 3</b> Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	1.1 Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas  1.2 Terlaksananya pemetaan pemanfaatan ruang	1.1.1 Meningkatkan Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah  1.2.1. Meningkatkan Koordinasi dalam penyusunan dokumen pemetaan Pemanfaatan Ruang	1.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan Dokumen Penataan Ruang Wilayah 1.1.1.2 Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang  1.2.1.1 Melaksanakan pemetaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

			1.3 Tertaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan Optimal Meningkatnya Peran Tata Ruang	1.3.1 Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang	1.3.1.1 Melaksanakan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Secara Berkala
4	<b>MISI 4 :</b> Melanjutkan terwujudnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal	1. Meningkatkan Fasilitas Investasi dan Realisasi Investasi di daerah	1.1. Meningkatkan investasi di daerah	1.1.1 Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM Penanaman Modal  1.2.1. Meningkatkan Koordinasi Antar Pelaku Penanaman Modal	1.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal 1.1.1.2 Menyediakan Sistem Informasi Penanaman Modal  1.2.1.1 Melaksanakan Kerjasama antar Pelaku Penanaman Modal
5	<b>MISI 5 :</b> Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur Dalam Perencanaan.	1.1. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Administrasi Dan Perkantoran.  1.2. Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Perencana.	1.1.1 Meningkatkan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perencanaan  1.2.1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	1.1.1.1 Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas  1.2.1.1 Mengikutsertakan Aparatur Perencana Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pendidikan Pelatihan bidang Perencanaan Pembangunan

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

### 1. Sasaran Strategis dan Program Tahun 2015

NO	SASARAN	PROGRAM
1	2	3
1	Tertaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu	1.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4.Program Perencanaan Sosial Budaya 5.Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya Alam 6.Program Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan



2	Terlaksananya Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dengan Optimal.	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Terlaksananya Penyusunan Data Informasi Yang Akurat.	1. Program Pengembangan Data Dan Informasi 2. Program Pengembangan Data Dan Informasi /Statistik Daerah
4	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas	1. Program Perencanaan Tata Ruang
5	Terlaksananya pemetaan pemanfaatan ruang	1. Program Pemanfaatan Ruang
6	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan Optimal	1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
7	Meningkatkan investasi di daerah	1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah 3. Program . Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
8	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Administrasi Dan Perkantoran.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Perencana	1. Program Pendidikan dan Pelatihan Formal

## 2. Program dan Kegiatan Tahun 2015

NO	PROGRAM	KEGIATAN	
1	3	4	
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		2	Penyediaan jasa kebersihan kantor
		3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		4	Penyediaan alat tulis kantor
		5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		9	Penyediaan makanan dan minuman
		10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
		12	Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13	Pengadaan peralatan gedung kantor
		14	Pengadaan mebeleur
		15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18	Pendidikan dan pelatihan formal
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	Program Pengembangan Data/Informasi	20	Penyusunan Profil Kabupaten
		21	Pengembangan Data Publikasi
6	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	22	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	23	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
8	Program Perencanaan Tata Ruang	24	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
		25	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
9	Program Pemanfaatan Ruang	26	Survey dan pemetaan
10	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	27	Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Penanaman Modal

11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	28	Pengawasan pemanfaatan ruang
12	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	29	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	30	Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
		31	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Anggaran Responsif Gender
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	32	Penyusunan rancangan RKPD
		33	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
		34	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
		35	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		36	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
		37	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS
		38	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD
		39	Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi ( RADPPK )
		40	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		41	Penyusunan Penyelarasan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dengan RPJMN Tahun 2015-2019
15	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	42	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
		43	Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP)
		44	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi
		45	Rencana aksi daerah prioritas pembangunan ekonomi
		46	Analisis Pendirian BUMD Kabupaten Bondowoso
16	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	47	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
		48	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD )
		49	Pendukung Kegiatan USAID
		50	Pendukung Kegiatan UNICEF
		51	Tim Pembina Kabupaten Sehat
		52	Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Pendidikan
		53	Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Kesehatan

		54	Analisis Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa
		55	Kajian Perencanaan Ketenagakerjaan
		56	Perencanaan Penanganan PMKS
		57	Evaluasi Kelembagaan BUMDES di Kabupaten Bondowoso
		58	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Pernikahan Dini di Kabupaten
17	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	59	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
		60	Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP/Parallel Financing
		61	Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
		62	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
		63	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)
		64	Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur
18	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	65	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		66	Penerbitan Buletin Warta Litbang
		67	Fasilitasi Dewan Riset Daerah
		68	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
		69	Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM

## C. Pengukuran Kinerja

### INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1	Meningkatnya Efektifitas Penelitian	1.	Persentase Penelitian Yang Ditindaklanjuti	1.1.	Jumlah Penelitian Yang <u>Ditindaklanjuti</u> Jumlah Penelitian Yang Dilakukan Tiap Tahun	100% (0 Kajian)	100% (0 Kajian)	100%
						Persentase Penelitian dan Pengembangan Yang Dilakukan	1.2.	Persentase Penelitian dan Pengembangan Yang Dilakukan <u>Dalam Tahun Berjalan</u> Jumlah Penelitian dan Pengembangan Yang Direncanakan s/d Tahun 2018	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	100 %
			2	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah	2.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1.1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun <u>Tepat Waktu</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tiap Tahun	<u>7 Dokumen</u> 7 Dokumen	<u>6 Dokumen</u> 6 Dokumen	85%
							1.2.	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang <u>Disusun Tepat Waktu</u> Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tiap Tahun	<u>1 Dokumen</u> 1 Dokumen	<u>1 Dokumen</u> 1 Dokumen	100%
					3.	Persentase Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD	2.1.	<u>Jumlah Program RKPD Tahun Ybs</u> Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Ybs	<u>190 Program</u> 203 Program	<u>153 Program</u> 203 Program	80,52%
					4.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	3.1.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan dengan <u>Peraturan Daerah</u> Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Ada (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100%

			3	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4.1	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah per Triwulan Yang Disusun <u>Tepat Waktu</u> Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Wajib Dilaksanakan Tiap Tahun	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	100%
2	Melanjutkan terwujudnya Sistik Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang handal.	Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat	6.	Ketersediaan Dokumen Data Informasi dan Statistik	5.1	Ketersediaan Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang <u>tersedia Tiap Tahun</u> Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang Wajib Disusun Tiap Tahun	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	100%
3	Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	5	Meningkatnya Peran Tata Ruang Daerah	7.	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	7.1	Persentase Jumlah Dokumen RTR <u>Kawasan Strategis Tersusun</u> Jumlah Kawasan Strategis Yang Harus Memiliki RDTRKawasan	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	100%
					8.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	8.1	<u>Luas Ruang Terbuka Hijau</u> Luas Wilayah Ber HPL/HGB	<u>149.276</u> 107.392,60	<u>147.878</u> 107.392,60	99,28%
					9.	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan	9.1	<u>Jumlah Bangunan Ber-IMB</u> Jumlah Bangunan	<u>79.000</u> 144.000	<u>79.977</u> 144.000	100%
					10.	Ketaatan Terhadap RTRW	10.1	<u>Realisasi RTRW</u> Rencana Peruntukkan RTRW	<u>148.210,00</u> 156.010,00	<u>149.816,32</u> 156.010,00	100%
					11.	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	11.1	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Ruang Publik Yang Ada	<u>3.510</u> 70.204,5	<u>0,00</u> 70.204,5	100%
					12.	Persentase Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Arahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso	12.1	Rekomendasi Yang Dikeluarkan <u>Yang Sesuai Arahan Tata Ruang Wilayah</u> Rekomendasi Yang Diajukan	<u>65 Rekom</u> 65 Rekom	<u>65 Rekom</u> 65 Rekom	100%

4	Melanjutkan Terwujudnya Optimalisasi Investasi di Daerah	Meningkatkan Fasilitas Investasi dan Realisasi Investasi di daerah	6	Meningkatnya Investasi di Daerah	13.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	13.1	Jumlah Investor PMA/PMDN Tiap Tahun	0 Investor	0 Investasi	100%
					14.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	14.1	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Tiap Tahun	Rp.4.290.700.000		100%
					15.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	15.1	Jumlah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp.5.000.000.000		100%
					16.	Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas	16.1	Σ Investasi Non Fasilitas	Rp.846.000.000.000	Rp.870.835.500.100	100%
5	Melanjutkan Terwujudnya Penyediaan Administrasi Perkantoran serta Sumberdaya Aparatur yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur.	7	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	17.	Ketepatan Waktu penyediaan kebutuhan pelayanan perkantoran	17.1	Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	100% 100%	100% ( 5 SK) 100% (23 SK)	100% 100%
					17.2		Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Badan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Penyusunan Laporan Keuangan	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
					17.3		Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan Dokumen Perencanaan Tersusun (renja,rka) Dokumen Pelaporan Tersusun (lkip,lakip,lppd)	100% 100%	100% 100% ( 2 Dok) ( 3 Dok )	100% 100%	
			8	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	18.	Persentase Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan keterampilan tiap tahun	18.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan keterampilan Tiap Tahun Jumlah Pegawai Negeri Sipil	100%	100% ( 53 Org )	100%

## TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2015

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	8
1.	<b>MISI 1 :</b> Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	1. meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1.1. Meningkatnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu  1.2 Meningkatnya Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.1.1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD 1.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 1.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 1.1.4 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 1.1.5 Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD 1.2.1 Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Wakt	%  Dokumen  Dokumen  Dokumen  Program  %	100  Ada  Ada  Ada  93,6  100 (6)
2	<b>MISI 2 :</b> Melanjutkan terwujudnya Sestim Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat.	1.1 Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan .	1.1.1 Meningkatnya Penyusunan Data Informasi  1.1.2 Meningkatnya dokumen data dan informasi yang dimanfaatkan SKPD	1.1.1.1 Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka 1.1.1.2 Tersedianya Buku PDRB Kabupaten 1.1.2.1. % Dokumen Data dan Informasi Yang Dapat Dijadikan Dasar Dalam Perencanaan Pembangunan	Dokumen  Dokumen  %	Ada  Ada  4



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	8
3	<b>MISI 3 :</b> Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	1 Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas  1.2 Meningkatnya pemetaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukkannya  1.3 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.1.1 Persentase Dokumen Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso  1.2.1 Persentase dokumen pemetaan pemanfaatan ruang 1.2.2 Rasio Ruang Terbuka Hijau 1.2.3. Rasio Bangunan BerIMB 1.2.4. Ruang Publik Yang Berubah Peruntukkannya 1.2.5 Ketaatan Terhadap RTRW 1.2.6 Luas Wilayah Produktif 1.2.7 Luas Wilayah Kebanjiran 1.2.8 Luas Wilayah Kekeringan 1.2.9 Luas Wilayah Perkotaan  1.3.1 Persentase Pemanfaatan Ruang Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso	%  % % % % % % % % % % %	40  40 1,39 0,55 5,00 95,00 90,00 5,00 10,00 1,50  40
4	<b>MISI 4 :</b> Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal	1. Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	1.1. Meningkatnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal  1.2. Meningkatnya Investasi di Daerah	1.1.1 Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Kemitraan  1.1.2.. Terselenggaranya promosi peluang investasi 1.2.1 Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas	Kali  Kali Milyar Rupiah	1  1 240

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	8
5	<b>MISI 5 :</b> Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	1.Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur Dalam Perencanaan.	1.1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran 1.2 Meningkatnya sarana dan Prasarana kantor 1.3. Meningkatnya Kemampuan Aparatur	1.1..1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1.2.1 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kantor 1.3.1 Meningkatkan Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kegiatan  Kegiatan  Orang	13  5  1

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BONDOWOSO**

**A. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015**

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso didasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya mengatur kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk merumuskan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso., Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten Bondowoso menangani kewenangan 4 (empat) urusan wajib yaitu :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Urusan Tata Ruang
3. Urusan Penanaman Modal
4. Urusan Statistik

# 1. CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN 2015

## Tabel Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Tahun 2015

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	KELUARAN (OUTPUT)		CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI	
<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>					
1	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya Buku Profil Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	Pengembangan Data Publikasi	Terlaksanannya pengembangan data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso melalui website.	1 Paket	1 Paket	100 %
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	Penyusunan Rancangan RKPDP	Tersusunnya dokumen RKPDP tahun 2016 dan dokumen RKPDP Perubahan Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Terlaksanannya penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Kabupaten	1 Kali	1 Kali	100 %
3	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan dan pengendalian pelaksanaan APBD (DAU, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi	1 Kali	1 Kali	100 %
5	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dana Alokasi Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS	Tersusunnya dokumen KU APBD tahun 2016, dokumen KU Perubahan APBD tahun 2015 dan dokumen PPAS APBD tahun 2016, dokumen PPAS Perubahan APBD tahun 2015	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
7	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda, LPPD, Lakip, Lkpi, Tahun 2015, DPA Tahun 2015, DPPA Tahun 2015, RKA Tahun 2016 dan RKA-P Tahun 2015, dan Bahan Rapat Kerja dengan DPRD Kabupaten Bondowoso	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
8	Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RADPPK)	Tersusunnya laporan pelaksanaan RAD PPK di Kabupaten Bondowoso	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
9	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksanannya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa antara lain RPJM Desa, RKP desa dan APBDesa	1 Kali	1 Kali	100 %
10	Penyusunan Penyelarasan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	Tersusunnya Draf penyelarasan dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso dengan dokumen RPJMN	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %

<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>					
1	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi di kabupaten, provinsi, dan pusat.	45 Kali	45 Kali	100 %
2	Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP)	Terlaksananya Laporan Hasil koordinasi pelaksanaan program anti kemiskinan dari pemerintah provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Laporan Hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi daerah pembangunan pangan dan gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	Rencana aksi daerah prioritas pembangunan ekonomi	Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5	Analisis Pendirian BUMD Kabupaten Bondowoso	Tersusunnya dokumen analisis kelayakan pendirian BUMD di Kabupaten Bondowoso	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>					
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya di kabupaten, provinsi, dan pusat.	45 Koord	45 Koord	100 %
2	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD )	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3	Pendukung Kegiatan USAID	Terlaksananya kesepakatan perbaikan pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	Pendukung Kegiatan UNICEF	Terlaksananya dokumen anggaran responsif anak dalam upaya peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan perlindungan anak dalam kegiatan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Kabupaten Layak Anak dan Kepemilikan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5	Tim Pembina Kabupaten Sehat	Terlaksananya penyusunan dokumen kelembagaan FBS, Kawasan Mandiri yang Sehat dan Kawasan Sarana dan Prasarana Sehat di Kec. Pujer dan Kec. Bondowoso	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
6	Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Pendidikan	Terlaksananya penyusunan dokumen analisis perencanaan IPM Pendidikan untuk peningkatan IPM Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7	Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Kesehatan	Tersusunnya dokumen analisis perencanaan IPM Kesehatan untuk peningkatan IPM Kab.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

8	Analisis Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya dokumen Analisis Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (peningkatan perencanaan pembangunan desa dan peningkatan kinerja aparatur desa)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
9	Kajian Perencanaan Ketenagakerjaan	Tersusunnya dokumen Kajian perencanaan ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso (penanganan pengangguran dan pengembangan ketenagakerjaan)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
10	Perencanaan Penanganan PMKS	Tersusunnya dokumen pemetaan dan penanganan PMKS di Kabupaten Bondowoso	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
11	Evaluasi Kelembagaan BUMDES di Kabupaten Bondowoso	Tersusunnya dokumen evaluasi keberadaan BUMDES untuk pengembangan kapasitas BUMDES.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
12	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Pernikahan Dini di Kabupaten	Tersusunnya dokumen RAD Penanganan Pernikahan Dini Kabupaten Bondowoso (identifikasi permasalahan dan penanganan pencegahan pernikahan dini secara integratif)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA</b>					
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah dan SDA di kabupaten, provinsi, dan pusat	10 Urusan	10 Urusan	100 %
2	Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP/Parallel Financing	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan pelaksanaan program WISMP di Kabupaten Bondowoso dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat maupun provinsi serta pelaksanaan penyadaran publik untuk HIPPA/GHIPPA	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
3	Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Tersusunnya dokumen Masterplan Permukiman yaitu Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersusunnya Dokumen Pemuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5	Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)	Terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan dan kemampuan teknis HIPPA/GHIPPA dalam sistem Irigasi Partisipatif berupa Sosialisasi Perda Irigasi,, pelatihan dan pelaksanaan penyusunan Profil Sosio Ekonomi Teknik Kelembagaan (PSETK),pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan penyusunan Program Kerja terpadu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	100 %

6	Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur	Terlaksananya laporan monitoring pelaksanaan program kegiatan pembangunan DAK Infrastruktur dan Belanja Modal 4 Unit Penunjang DAK	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>					
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan di kabupaten, provinsi, dan pusat.	20 Kali	20 Kali	100 %
2	Penerbitan Buletin Warta Litbang	Tersusunnya Buletin Warta Litbang di Kabupaten Bondowoso	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Tersusunnya Agenda Riset Daerah, Kebijakan Strategis Daerah dan Rekomendasi melalui survey, kunjungan kerja, dan Focus Group Discussion (FGD)	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
4	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Tersusunnya Roadmap penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Bondowoso 2015-2018 dan Tersusunnya Buku Analisa Kawasan Strategis dan Potensi Investasi dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bondowoso	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
5	Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM	Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM sektor batik, tahu, akik dan krupuk	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	Penyebarnya Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya kunjungan kerja Bupati Bondowoso ke Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100 %
2	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Anggaran Responsif Gender	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Anggaran Responsif Gender ke seluruh SKPD dan Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100 %
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, internet dan listrik kantor	3 Jenis	3 Jenis	100 %
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor	6 Orang	6 Orang	100 %
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	13 Kali	13 Kali	100 %
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30 Jenis	30 Jenis	100 %
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	13 jenis	100 %
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 Jenis	15 Jenis	100 %
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	13 Jenis	100 %
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	100 %
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat kordinasi	13 Kali	13 Kali	100 %

10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142 Kali	142 Kali	100 %
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	2 Orang	2 Orang	100 %
12	Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat	Tersedianya Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat	1 Kali	1 Kali	100 %
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	12 Jenis	12 Jenis	100 %
2	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Pengadaan mebeleur	5 Jenis	5 Jenis	100 %
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Paket	3 Paket	100 %
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	106 Kali	106 Kali	100 %
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15 Unit	15 Unit	100 %
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Motivation Training dan Outbond Pegawai Bappeda	1 Kali	1 Kali	100 %
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>					
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Terlaksananya pendampingan asistensi pembuatan peta Raperda RDTRK Strategis Perkotaan Tamanan dan Maesan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Prajekon	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>					
1	Survey dan pemetaan	Tersedianya up dating peta penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso dan data perkembangan indikator penataan ruang.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>					
1	Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersusunnya laporan pengawasan pemanfaatan ruang secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>					
1	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan	Tersusunnya dokumen PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>					
1	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya Laporan Hasil Capaian SPM dan Laporan Bulanan Data Investasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>					
1	Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,Sarana dan Prasarana Daerah</b>					
1	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersusunnya dokumen kajian potensi minapolitan di Kabupaten Bondowoso	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



## 2. CAPAIAN HASIL (OUTCOME) PROGRAM S/D 2015

### a. Capaian Hasil (Outcome) Program s/d Tahun 2015

**Tabel**  
**Capaian Hasil (Outcome) Program s/d Tahun 2015**

NO	INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	TARGET S/D 2015 (Akumulasi 2014-2015)		REALISASI S/D 2015 (Akumulasi 2014-2015)		CAPAIAN KINERJA (%)
<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>						
1	Tersedianya buku BDA	Ada	100%	Ada	100%	100%
2	Persentase Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	100%	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	100%	100%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD	<u>13 Dokumen</u> 13 Dokumen	100%	<u>12 Dokumen</u> 12 Dokumen	85 %	85 %
2.	Ketepatan waktu penyusunan LAKIP dan LKPJ	<u>90 Hari</u> 90 Hari	100%	<u>90 Hari</u> 90 Hari	100%	100%
3.	Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	<u>8 Dokumen</u> 8 Dokumen	100%	<u>8 Dokumen</u> 8 Dokumen	100%	100%
4.	Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD, KU, PPAS	<u>12 Dokumen</u> 12 Dokumen	100%	<u>12 Dokumen</u> 12 Dokumen	100%	100%
5	Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan	Ada	100%	Ada	100%	100%
6	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang telah Ditetapkan dengan peraturan	Ada	100%	Ada	100%	100%
7.	Tersedianya Dokumen RKPD yang Telah Ditetapkan dengan peraturan	Ada	100%	Ada	100%	100%
8	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	<u>190</u> 203	100%	<u>153</u> 203	80,52	80,52
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>						
1	Persentase Masterplan Ekonomi Yang Digunakan Untuk Perencanaan	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	100%	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<u>45 .Koord</u> 45 Koord	100%	<u>45 .Koord</u> 45 Koord	100%	100%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>						
1	% Masterplan Bidang Sosial Budaya yang digunakan untuk perencanaan	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	100%	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	100%	100%
2	% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang SosBud.	<u>45 Koord</u> 45 Koord	100%	<u>45 Koord</u> 45 Koord	100%	100%

<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>						
1	% Masterplan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang disusun	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	100%	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	100%	100%
2	% Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang digunakan untuk perencanaan	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	100%	<u>2 Dokumen</u> 2 Dokumen	100%	100%
3	% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.	<u>10 Urusan</u> 10 Urusan	100%	<u>10 Urusan</u> 10 Urusan	100%	100%
<b>Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>						
1	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	0 Dokumen	100%	0 Dokumen	100%	100%
2	Persentase Penelitian dan Pengembangan Yang Dilakukan	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	100%	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	100%	100%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi/ Bimbingan Teknis	240 Orang	100%	240 Orang	100%	100%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Barang	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
1	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	53 Org	100%	53 Org	100%	100%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>						
1	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	100%	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	100%	100%
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>						
1	Persentase Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersusun	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	40%	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	40%	100%
<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>						
1	Persentase Dokumen Pemanfaatan Ruang yang disusun	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	40 %	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	40 %	100%
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	<u>149.276</u> 107.392	1,39 %	<u>147878</u> 107.392	1,38 %	99,28 %
3	Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan	<u>79.000</u> 144.000	0,55 %	<u>79.977</u> 144.000	0,56 %	100%

4	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	<u>3.510,00</u> 70.204,50	5,00 %	<u>00</u> 70.204,50	,00 %	100%
5	Ketaatan terhadap RTRW	<u>148.210,00</u> 156.010,00	95,00 %	<u>149.816,32</u> 156.010,00	101 %	100%
6	Luas Wilayah Produktif	<u>96.653,00</u> 107.392,60	90,00 %	<u>99.260,69</u> 107.392,60	102 %	100%
7	Luas Wilayah Industri	<u>107,00</u> 107.392,60	0,10 %	<u>32,94</u> 107.392,60	30 %	30 %
8	Luas Wilayah Kebanjiran	<u>5.370,00</u> 107.392,60	5,00 %	<u>2,50</u> 107.392,60	0,00 %	100%
9	Luas Wilayah kekeringan	<u>10.739,00</u> 107.392,60	10,00 %	<u>100,00</u> 107.392,60	0,09 %	100%
10	Luas Wilayah Perkotaan	<u>1.611,00</u> 107.392,60	1,50 %	<u>1.450,00</u> 107.392,60	1,35 %	90%
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>						
1	Persentase Laporan Pengendalian dan pemanfaatan Ruang tersusun	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	40%	<u>2 Dokumen</u> 5 Dokumen	40%	100%
2	Persentase Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Arah Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso	<u>30 Rekom</u> 30 Rekom	100%	<u>65 Rekom</u> 65 Rekom	100%	100%
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>						
1	Tersedianya buku PDRB kabupaten	Ada	100%	Ada	100%	100%
2	Persentase Data/Informasi yang siap digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	100%	<u>4 Dokumen</u> 4 Dokumen	100%	100%
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>						
1	Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan	1 Kali	100%	1 Kali	100%	100%
2	Terselenggaranya Promosi peluang Investasi	1 Kali	100%	1 Kali	100%	100%
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>						
1	Tersedianya Informasi peluang Usaha sektor/bidang usaha unggulan tiap tahun	<u>1 Sektor</u> 5 Sektor	20%	<u>1 Sektor</u> 5 Sektor	20%	100%
2	Jumlah Investasi Non Fasilitasi	240/200 M	20%	870,835.500.100 /200 M	435 %	100%
<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,Sarana dan Prasarana Daerah</b>						
1	Persentase Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi yang tersusun	<u>2 Dokumen</u> 8 Dokumen	25%	<u>2 Dokumen</u> 8 Dokumen	25%	100%

## Diskripsi Capaian Hasil (Outcome) Tahun 2015

1. Tersedianya buku Data Bondowoso Dalam Angka (BDA) yaitu tersedianya Buku Bondowoso Dalam Angka (BDA) yang bekerjasama dengan Kantor BPS kabupaten Bondowoso
2. Persentase Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan yaitu Buku Data Bondowoo Dalam Angka (BDA) dan Buku Data Profil Kabupaten Bondowoso

3. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan dengan target 7 Dokumen dan realisasi sebanyak 6 (enam) Dokumen atau 85 % yang terdiri atas :
  1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
  2. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015
  3. Dokumen Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun 2016
  4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016
  5. Dokumen KU Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
  6. Dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
  7. RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019 tidak dapat tercapai karena masih dalam tahap penyusunan.
4. Ketepatan waktu penyusunan LAKIP dan LKPJ dengan target 90 hari dapat terealisasi yaitu tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Bondowoso yang telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Bondowoso
5. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu sebanyak 4 (dokumen) dokumen atau 100 % sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 4 Dokumen yang meliputi :
  1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014
  2. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015
  3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DAK Kabupaten Bondowoso Tahun 2015
  4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DAK Infrastruktur Tahun 2015
6. Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD, KU, PPAS dengan target sebanyak 6 (enam) dokumen dan terealisasi 100 % ( 6 dokumen) yang terdiri atas :
  1. Dokumen RKPD Tahun 2016,
  2. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015
  3. Dokumen KU APBD Tahun 2016,
  4. Dokumen PPAS APBD Tahun 2016,
  5. Dokumen Perubahan KU APBD Tahun 2015 dan
  6. Dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun 2015,
7. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, yaitu :
  1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025
  2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018
  3. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2015 tentang RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2016
8. Penjabaran program pada tahun 2015 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso 2014-2018 yang dilaksanakan dalam RKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2015 sebanyak 153 program dari 190 Program pada tahun 2015 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso (80,52%)

9. Persentase Masterplan Ekonomi Yang Digunakan Untuk Perencanaan sebanyak 2 Dokumen Masterplan yaitu Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan.
10. Persentase Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yaitu sebanyak 45 Kali Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan bidang ekonomi yang dilakukan dalam setahun
11. % Masterplan Bidang Sosial Budaya yang digunakan untuk Perencanaan sebanyak 2 Dokumen Masterplan yaitu Masterplan Pendidikan dan Masterplan Kesehatan.
12. % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya sebanyak 45 Kali Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan bidang ekonomi yang dilakukan dalam setahun
13. % Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang disusun sebanyak 1 Dokumen Masterplan yaitu Masterplan Permukiman.
14. % Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang digunakan untuk perencanaan sebanyak 2 (dua) Dokumen Masterplan yaitu Masterplan Persampahan dan Masterplan Transportasi Daerah.
15. % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah sebanyak 10 Urusan Wajib dan Pilihan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan bidang Prasarana Wilayah yang dilakukan dalam setahun
16. Persentase Penelitian dan Pengembangan Yang Dilakukan sebanyak 2 Dokumen Penelitian sampai dengan tahun 2015 yaitu Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM dengan fokus penguatan kelembagaan dan Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM dengan fokus pengembangan sektor batik, tahu, akik dan krupuk
17. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi/ Bimbingan Teknis terealisasi 120 orang melalui sosialisasi dokumen RKPD kabupaten Bondowoso
18. Persentase Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersusun yaitu Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Prajekon
19. Persentase Dokumen Pemanfaatan Ruang yang disusun yaitu Tersedianya dokumen up dating peta penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso dan data perkembangan indikator penataan ruang yang berisi data Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB, Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan, Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya, Ketaatan terhadap RTRW, Luas Wilayah Produktif, Luas Wilayah Industri, Luas Wilayah Kebanjiran dan Luas Wilayah Perkotaan
20. Persentase Laporan Pengendalian dan pemanfaatan Ruang tersusunnya laporan pengawasan pemanfaatan ruang secara berkala yang merupakan hasil koordinasi BKPRD.
21. Persentase Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Arahan Tata Ruang sebanyak 65 Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKPRD selama tahun 2015
22. Tersedianya buku PDRB kabupaten tersedianya Buku PDRB Kabupaten yang bekerjasama dengan Kantor BPS kabupaten Bondowoso

23. Persentase Data/Informasi/Statistik yang siap digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan yaitu Buku Data PDRB Kabupaten dan Buku Data IPM.
24. Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan dilaksanakannya Forum Investasi yang bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Jember dan Bank Jawa Timur Cabang Bondowoso pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan mengikutsertakan Kadin Jawa Timur, sosiasi Pariwisata Jawa Timur dengan beberapa Pelaku Usaha/Pengusaha di Kabupaten Bondowoso dengan Topik Pertemuan adalah Pengembangan Pariwisata Bondowoso.
25. Terselenggaranya Promosi peluang Investasi yaitu dilaksanakannya Pekan Kreatif Bondowoso dan Dialog Investasi pada tanggal 30 Mei 2016 dengan Bank Indonesia Perwakilan Jember dan Pengusaha skala nasional dan regional Bondowoso dengan topik Potensi Kopi Bondowoso yang sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Jawa Ijen Raung serta dengan Jurnalis dan media Televisi Nasional dengan topik yang dibahas adalah Promosi Potensi Pariwisata.
26. Tersedianya Informasi peluang Usaha sektor/bidang usaha unggulan tiap tahun yaitu Sektor Pertanian yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Bondowoso masih terus diupayakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sub Sektor yang dieksplorasi pada tahun 2015 adalah potensi minapolitan. Hasil rekomendasi eksplorasi diperoleh bahwa di kabupaten Bondowoso dapat dikembangkan kawasan minapolitan turunan kawasan agropolitan yang sudah terlebih dahulu terbentuk.
27. Jumlah Investasi Non Fasilitasi meningkat yaitu sebesar Rp.870.835.500.100
28. Persentase Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi yang tersusun yaitu dokumen kajian potensi sub sektor pertanian (bambu) Tahun 2014 dan dokumen kajian potensi minapolitan di Kabupaten Bondowoso tahun 2015

# I.AKUNTABILITAS ANGGARAN TAHUN 2015

**Tabel  
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015**

N O	NAMA KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>1</b>	<b>3</b>						
	<b>Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>			100 %	<b>618.703.000</b>	<b>499.872.758</b>	<b>80,79%</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis	100 %	185.200.000	126.034.807	68,05%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6 Orang	6 Orang	100 %	28.800.000	28.800.000	100,00%
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13 Kali	13 Kali	100 %	40.400.000	40.400.000	100,00%
4	Penyediaan alat tulis kantor	30 Jenis	30 Jenis	100 %	37.397.500	34.581.200	92,47%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	13 jenis	100 %	28.200.000	28.200.000	100,00%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 Jenis	15 Jenis	100 %	7.037.500	7.037.500	100,00%
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	13 Jenis	100 %	12.885.000	12.885.000	100,00%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2.000.000	2.000.000	100,00%
9	Penyediaan makanan dan minuman	13 Kali	13 Kali	100 %	35.615.000	27.637.500	77,60%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142 Kali	142 Kali	100 %	224.968.000	176.396.751	78,41%
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	2 Orang	2 Orang	100 %	8.700.000	8.400.000	96,55%

12	Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat	1 Kali	1 Kali	100 %	7.500.000	7.500.000	100,00%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			100 %	<b>600.594.000</b>	<b>557.958.622</b>	<b>92,90%</b>
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Jenis	12 Jenis	100 %	180.737.000	168.906.690	93,45%
14	Pengadaan mebeleur	5 Jenis	5 Jenis	100 %	45.000.000	44.530.000	98,96%
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Paket	3 Paket	100 %	210.000.000	207.877.000	98,99%
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	106 Kali	106 Kali	100 %	151.357.000	123.144.932	81,36%
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15 Unit	15 Unit	100 %	13.500.000	13.500.000	100,00%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			100 %	<b>100.000.000</b>	<b>99.852.500</b>	<b>99,85%</b>
18	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Kali	1 Kali	100 %	100.000.000	99.852.500	99,85%
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			100 %	<b>3.500.000</b>	<b>3.492.000</b>	<b>99,77%</b>
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	3.500.000	3.492.000	99,77%
	<b>Program pengembangan data/informasi</b>			100 %	<b>165.000.000</b>	<b>139.046.436</b>	<b>84,27%</b>
20	Penyusunan Profil Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	115.000.000	92.599.386	80,52%
21	Pengembangan Data Publikasi	1 Paket	1 Paket	100 %	50.000.000	46.447.050	92,89%
	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>			100 %	<b>165.000.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>4,70%</b>
22	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan	2 Dokumen	1 Dokumen	40 %	165.000.000	7.750.000	4,70%
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			100 %	<b>75.000.000</b>	<b>72.166.300</b>	<b>96,22%</b>
23	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	75.000.000	72.166.300	96,22%
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>			100 %	<b>475.000.000</b>	<b>461.054.780</b>	<b>97,06%</b>
24	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	175.000.000	171.526.780	98,02%



25	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	300.000.000	289.528.000	96,51%
	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>			100 %	<b>90.000.000</b>	<b>86.021.500</b>	<b>95,58%</b>
26	Survey dan pemetaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	90.000.000	86.021.500	95,58%
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>			100 %	<b>150.000.000</b>	<b>142.607.850</b>	<b>95,07%</b>
27	Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	142.607.850	95,07%
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>			100 %	<b>200.000.000</b>	<b>193.612.900</b>	<b>96,81%</b>
28	Pengawasan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	200.000.000	193.612.900	96,81%
	<b>Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah</b>			100 %	<b>150.000.000</b>	<b>134.728.200</b>	<b>89,82%</b>
29	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	134.728.200	89,82%
	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>			100 %	<b>205.336.750</b>	<b>167.407.550</b>	<b>81,53%</b>
30	Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Kali	1 Kali	100 %	160.336.750	125.086.450	78,01%
31	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Anggaran Responsif Gender	1 Kali	1 Kali	100 %	45.000.000	42.321.100	94,05%
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>			100 %	<b>2.103.756.000</b>	<b>1.797.643.850</b>	<b>85,45%</b>
32	Penyusunan rancangan RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	208.000.000	200.588.950	96,44%
33	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	1 Kali	1 Kali	100 %	160.000.000	133.178.850	83,24%
34	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	160.000.000	147.732.500	92,33%
35	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 Kali	1 Kali	100 %	195.000.000	115.774.950	59,37%

36	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100.000.000	79.310.250	79,31%
37	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	414.756.000	396.918.250	95,70%
38	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	50.000.000	49.247.200	98,49%
39	Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi ( RADPPK )	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	128.000.000	40.430.150	31,59%
40	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Kali	1 Kali	100 %	248.000.000	230.106.250	92,78%
41	Penyusunan Penyelarasan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	440.000.000	404.356.500	91,90%
	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>			100 %	<b>633.000.000</b>	<b>604.489.550</b>	<b>95,50%</b>
42	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	45 Kali	45 Kali	100 %	100.000.000	94.940.400	94,94%
43	Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	98.000.000	94.018.950	95,94%
44	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	50.000.000	42.746.250	85,49%
45	Rencana aksi daerah prioritas pembangunan ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	225.000.000	215.269.450	95,68%
46	Analisis Pendirian BUMD Kabupaten Bondowoso	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	160.000.000	157.514.500	98,45%
	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>			100 %	<b>1.703.500.000</b>	<b>1.619.066.420</b>	<b>95,04%</b>
47	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	45 Koord	45 Koord	100 %	100.000.000	98.245.200	98,25%
48	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD )	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	215.000.000	195.887.170	91,11%
49	Pendukung Kegiatan USAID	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	154.196.000	148.355.000	96,21%
50	Pendukung Kegiatan UNICEF	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100.000.000	92.869.450	92,87%
51	Tim Pembina Kabupaten Sehat	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	159.304.000	141.768.500	88,99%

52	Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	125.000.000	121.085.650	96,87%
53	Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	125.000.000	121.041.850	96,83%
54	Analisis Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	142.665.500	95,11%
55	Kajian Perencanaan Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	143.571.350	95,71%
56	Perencanaan Penanganan PMKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	142.302.550	94,87%
57	Evaluasi Kelembagaan BUMDES di Kabupaten Bondowoso	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	148.300.950	98,87%
58	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Pernikahan Dini di Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	125.000.000	122.973.250	98,38%
	<b>Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>			100 %	<b>905.621.000</b>	<b>840.177.935</b>	<b>92,77%</b>
59	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	10 Urusan	10 Urusan	100 %	100.000.000	96.482.882	96,48%
60	Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP/Parallel Financing	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	84.929.000	80.728.484	95,05%
61	Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	270.000.000	253.289.650	93,81%
62	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	140.000.000	127.578.360	91,13%
63	Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	100 %	160.692.000	147.100.373	91,54%
64	Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	134.998.186	90,00%
	<b>Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>			100 %	<b>880.000.000</b>	<b>822.783.700</b>	<b>93,50%</b>
65	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	20 Kali	20 Kali	100 %	75.000.000	65.429.850	87,24%
66	Penerbitan Buletin Warta Litbang	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	40.000.000	36.789.250	91,97%

67	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	450.000.000	426.012.000	94,67%
68	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	165.000.000	146.659.900	88,88%
69	Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	150.000.000	147.892.700	98,60%
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>			<b>96,67 %</b>	<b>9.224.010.750</b>	<b>8.249.732.851</b>	<b>89,44%</b>

## **Permasalahan dan Solusi**

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bondowoso selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Masih kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya perencanaan pembangunan daerah khususnya pada pemahaman indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran sehingga diperlukan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi yang terus menerus kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pemahaman Aparatur.
2. Masih kurangnya konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga diperlukan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi tentang penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat pemerintahan desa (RPJMDesa/RKPDes, APBDesa) maupun di tingkat Kabupaten (Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD)
3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bondowoso sehingga perlu diprioritaskan program peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengembangan agribisnis pada sektor pertanian/kehutanan dan pariwisata.
4. Kurangnya jumlah pegawai utamanya unsur staf, tidak mengimbangi beban tugas pokok dan fungsi perencanaan maupun tugas pengelolaan administrasi keuangan kegiatan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan keuangan kegiatan tidak sesuai rencana penyerapan anggaran bulanan atau triwulanan. sehingga memerlukan adanya penambahan staf/pegawai.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang menjadi hal yang harus terpenuhi untuk kelancaran pelaksanaan tugas walaupun dari sisi jumlah telah mencukupi akan tetapi beberapa sarana yang ada mengalami gangguan yang diakibatkan dari usia dan volume penggunaan yang sangat besar. Pengadaan atau pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor menjadi hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti : pengadaan dan pemeliharaan komputer, printer, LCD, kendaraan dinas, meubelair, ruang kerja dan rehabilitasi/ pemeliharaan gedung.
6. Meninggkat permasalahan dan pelaksanaan pembangunan semakin berkembang serta teknologi informasi yang berkembang pula, maka

- diharapkan perlunya staf/pegawai Bappeda mengikut Pendidikan dan Pelatihan - Pelatihan atau Bimbingan Teknis, baik itu dalam Perencanaan Pembangunan maupun bidang teknis lainnya untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
7. Tindak lanjut hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan perlu ditingkatkan agar Kajian yang dilakukan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
  8. Belum tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang yang memadai. Pengaturan Rencana Tata Ruang hanya didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bondowoso. Masih terdapat beberapa kawasan strategis dan prioritas perkembangannya sangat dinamis belum disusun rencana detail tata ruangnya (RDTR).
  9. Kebijakan penataan ruang yang ada belum optimal mengakomodir perkembangan sosial ekonomi masyarakat diantaranya meningkatnya pengembangan perumahan baru dikawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah irigasi menjadi tanaman kehutanan dan ruang terbangun (perumahan, pergudangan dan usaha) maraknya pertambangan pasir, batuan tanpa ijin dan tumbuhnya pemanfaatan ruang di sempadan jalan (rumija dan ruwasja) serta sempadan sungai.
  10. Belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dikawasan perkotaan sesuai ketentuan minimal yaitu 20 % dari luas kawasan perkotaan.
  11. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi arahan Rencana Tata Ruang dan mengikuti mekanisme perijinan pemanfaatan ruang dengan benar.
  12. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah.
  13. Penyelenggaraan dan pengolahan data/informasi/statistik sebagaimana Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) meskipun urusan penyelenggaraan pemerintahannya menjadi urusan Pemerintah Daerah sehingga data - data publis yang terkait dengan indikator makro daerah menjadi tanggungjawab BPS. Sedangkan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan hanya terealisasi sebesar 40 % atau 1 (satu) dokumen PDRB Kabupaten dari 2 (dua) dokumen yang ditargetkan , hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dalam pola penghitungan PDRB di tingkat Kecamatan oleh BPS
  14. Kelembagaan penanaman modal masih belum ada meskipun pelayanan perijinan terpadu sudah berdiri dan sudah menerbitkan 72 Jenis Perijinan.

15. Pelaksanaan urusan penanaman modal masih menempel pada SKPD lain (Bappeda) sehingga pelaksanaannya belum maksimal.  
Sedangkan solusi yang diterapkan diantaranya dengan :
- a. Mengupayakan berdirinya lembaga penanaman modal yang mandiri agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan maksimal
  - b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan penanaman modal dan pengembangan peluang investasi di tiap sektor terus dilakukan sebagai dasar penetapan arah kebijakan dan target pembangunan penanaman modal.
  - c. Promosi peluang investasi dan potensi daerah yang dikoordinasikan dengan masing masing SKPD Sektoral dan dilakukan melalui berbagai media.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bondowoso sehingga dengan melihat gambaran capaian kinerja program serta aspek keuangan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Bondowoso secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan.

#### B. Saran

Sedangkan dengan melihat permasalahan yang telah diidentifikasi, maka diharapkan dapat diatasi sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bondowoso Tahun 2015.

Bondowoso, Pebruari 2016

KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

Ir.MATSAKUR,MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580827 198711 1 001



## **RANGKUMAN LAKIP BAPPEDA TAHUN 2015**

### A. Dasar Penyusunan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP).
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

### B. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bappeda Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 menggambarkan :

1. Pelaksanaan Program / Kegiatan dan Anggaran berdasarkan DPPA Bappeda Tahun 2015
2. Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 (RPJMD Lama) , terdiri dari :
  - a. Indikator Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan sebanyak 69 Kegiatan atau 69 Indikator Keluaran (Output, dengan capaian realisasi fisik 98,33 % kecuali Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan terealisasi 40 % yaitu penyusunan 1 (satu) dokumen PDRB Kabupaten, sedangkan 1 (satu) dokumen PDRB Kecamatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya perubahan dalam pola penghitungan PDRB di tingkat Kecamatan oleh BPS
  - b. Indikator Kinerja Program ( Hasil ) sebanyak 40 Indikator Kinerja Program dengan capaian secara umum mencapai 100 % kecuali Indikator Kinerja pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu
    - Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD dengan target 7 (tujuh) dokumen terealisasi sebanyak 6 (enam) dokumen atau 85 % , karena Dokumen Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN belum dapat disusun dan masih menunggu pertemuan/asistensi dengan Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemendagri)
    - Indikator Kinerja Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2015 hanya mencapai 80,52 % atau dari Target 190 Program Terealisasi 153 Program dikarenakan jumlah program yang dianggarkan pada tahun 2015 disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2015 dan kemampuan anggaran.

- c. Indikator Kinerja Sasaran/Utama (IKU) sebanyak 18 IKU dengan capaian secara umum 100 % kecuali
  - Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu dengan target 7 Dokumen terealisasi 6 dokumen atau 85 %
  - Indikator Kinerja Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2015 hanya mencapai 80,52 % atau dari Target 190 Program Terealisasi 153 Program dikarenakan jumlah program yang dianggarkan pada tahun 2015 disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2015 dan kemampuan anggaran
  - Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Tiap Tahun dengan target tahun 2015 sebesar Rp.4.290.700.000 sampai sat ini belum dapat dihitung karena penghitungan dilakukan oleh BKPM Jawa Timur.

C. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016, berdasarkan :

- a. Indikator Kinerja yang terdapat dalam Draf Rancangan Penyelarasan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dengan RPJMN Tahun 2015-2019
- b. DPA Bappeda Tahun 2016
- c. Tupoksi Bappeda Kabupaten Bondowoso
- d. Jumlah Sasaran dan IKU : 8 ( delapan ) Sasaran dan 20 IKU terdiri dari :
  - Urusan Perencanaan Pembangunan : 3 Sasaran / 5 IKU
  - Urusan Tata Ruang : 1 Sasaran / 6 IKU
  - Urusan Penanaman Modal : 1 Sasaran / 4 IKU
  - Urusan Statistik : 1 Sasaran / 1 IKU
  - Rutin : 2 Sasaran / 4 IKU

Bondowoso, Pebruari 2016  
Kasubbag Perencanaan

Yuda Nataba

